

**Pendekatan Implementasi Peran UN *Women* dalam Mengatasi Diskriminasi
Sosial terhadap Perempuan di India Tahun 2018-2022**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD ARIQ RAIHAN

17323127

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

Pendekatan Implementasi Peran UN *Women* dalam Mengatasi Diskriminasi

Sosial terhadap Perempuan di India Tahun 2018-2022

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMMAD ARIQ RAIHAN

17323127

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PENDEKATAN IMPLEMENTASI PERAN UN *WOMEN* DALAM
MENGATASI DISKRIMINASI SOSIAL TERHADAP PEREMPUAN DI
INDIA TAHUN 2018-2022**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
22 Agustus 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

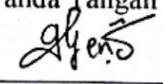
Ketia Program Studi

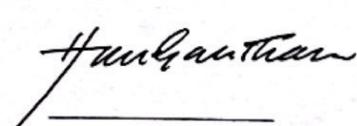

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

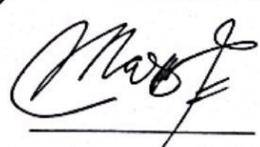
Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.
- 2 Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.







PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

25 Juli 2023



Muhammad Ariq Raihan

DAFTAR ISI

PENDEKATAN IMPLEMENTASI PERAN UN <i>WOMEN</i> DALAM MENGATASI DISKRIMINASI SOSIAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDIA TAHUN 2018-2022	I
SKRIPSI	I
HALAMAN PENGESAHAN	III
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	IV
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR SINGKATAN	VIII
ABSTRAK	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN	6
1.4 CAKUPAN PENELITIAN	6
1.5 TINJAUAN PUSTAKA	7
1.6 KERANGKA PEMIKIRAN	10
1.7 ARGUMEN SEMENTARA	13
1.8 METODE PENELITIAN	13
1.8.1 Jenis Penelitian	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	14
1.8.4 Proses Penelitian	14
1.9 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	14
BAB II SEJARAH MASUKNYA UN <i>WOMEN</i> DI INDIA DAN DISKRIMINASI PEREMPUAN DALAM SEKTOR SOSIAL	15
2.1 SEJARAH MASUKNYA UN <i>WOMEN</i> DI INDIA	16
2.2 DISKRIMINASI SOSIAL PEREMPUAN DI INDIA TAHUN 2018-2022	19
2.1.1 Sistem Dowry (Mahar)	20
2.1.2 Female Feoticide (Tradisi Aborsi Bayi Perempuan)	22
2.1.3 Genitoplasty (Operasi Jenis Kelamin)	23
2.1.4 Tradisi Sati (Perlakuan terhadap Janda di India)	23

BAB III IMPLEMENTASI PERAN UN <i>WOMEN</i> DALAM MENGATASI DISKRIMINASI PEREMPUAN DI INDIA MELALUI <i>MANAGEMENT APPROACH</i> DAN <i>NORMATIF APPROACH</i>	25
3.1 PENDEKATAN <i>MANAGEMENT</i> OLEH UN <i>WOMEN</i> DALAM MENGATASI DISKRIMINASI PEREMPUAN DI INDIA.....	28
3.1.1 <i>Monitoring UN Women berdasarkan Laporan Negara</i>.....	29
3.1.3 <i>Monitoring UN Women berdasarkan Masukan IGO</i>	36
3.2 PENDEKATAN <i>NORMATIF</i> OLEH UN <i>WOMEN</i> DALAM MENGATASI DISKRIMINASI PEREMPUAN DI INDIA.....	40
3.2.1 <i>Otoritas sebagai Pendekatan Normatif oleh UN Women</i>	42
3.2.2 <i>Legitimasi sebagai Pendekatan Normatif oleh UN Women</i>.....	45
BAB IV	47
PENUTUP	47
4.1 KESIMPULAN.....	47
4.2 SARAN.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tiga Pendekatan dalam mengimplementasikan Organisasi Internasional.....	10
Tabel 2. Peningkatan kasus <i>Dowry Deaths</i> di India Tahun 2018-2021	34

DAFTAR SINGKATAN

AITUC	: <i>All India Trade Union Congress</i>
CEDAW	: <i>The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
CFWI	: <i>Construction Workers Federation of India</i>
CSO	: <i>Chief Strategy Officer</i>
DAW	: <i>Division for the Advancement of Women</i>
EWG	: <i>Expert Working Group</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
ILO	: <i>The International Labour Organization</i>
INSTRAW	: <i>International Research and Training Institute for the Advancement of Women</i>
MAKAAM	: <i>Mahila Kisan Adhikar Manch</i>
NASVI	: <i>National Association of Street Vendors of India</i>
NDWM	: <i>National Domestic Workers Movement</i>
OSAGI	: <i>Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women</i>
UDHR	: <i>Universal Declarations of Human Rights</i>
UNIFEM	: <i>United Nations Development Fund for Women</i>
SCE	: <i>UN Women's second chance education</i>
WIEGO	: <i>Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing</i>

ABSTRAK

India merupakan salah satu negara dengan padatnya jumlah penduduk, namun juga dengan ketidak-setaraan gender yang tinggi. Ketidak-setaraan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah budaya patriarki atau *pativrata*. Di mana, masyarakat menganggap rendah perempuan di India. Terdapat tiga pendekatan dalam implementasi Organisasi Internasional, yaitu *Enforcement Approach*, *Management Approach* dan *Normatif Approach*. *Enforcement Approach* bersifat memaksa dan memperlihatkan kepatuhan dalam perjanjian internasional dengan cara memaksa. *Management Approach* bersifat terbuka dan menekankan pada penyelesaian masalah serta transparansi. *Normatif Approach* berlandaskan kepercayaan, di mana ORI memiliki otoritas dan negara bersangkutan memberikan kepercayaannya. Penulis melihat UN *Women* dalam mengatasi diskriminasi perempuan di India berhasil. Dilihat melalui implementasi teori Peran Organisasi Internasional dalam mengatasinya. Di mana dalam *management approach* terdapat *monitoring* melalui laporan negara, berdasarkan masukan ahli, serta berdasarkan masukan IGO. Hal ini juga didukung dengan peningkatan kapasitas melalui program-program kerja sama untuk mengurangi diskriminasi perempuan. Keseluruhan pendekatan ini cukup berhasil untuk mengurangi diskriminasi terhadap perempuan. Dalam mengatasi ketidak-setaraan gender di India, pemerintah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi CEDAW untuk menghapus segala bentuk diskriminasi perempuan. Ratifikasi ini dilakukan pada 9 Juli 1993. Keberadaan UN *Women* di India memberikan kontribusi untuk mengatasi kesetaraan gender, meskipun isu ini cukup kompleks dan mengakar kuat di India.

Kata Kunci: Peran, UN *Women*, Diskriminasi Sosial, India

India is a country with a dense population, but also with high gender inequality. This inequality is caused by several factors, one of which is patriarchal or pativrata culture. Where, society despise women in India. There are three approaches to the implementation of International Organizations, namely the Enforcement Approach, Management Approach and Normatif Approach. The Enforcement Approach is coercive and demonstrates compliance with international agreements by force. The Management Approach is open and emphasizes problem solving and transparency. The Normatif Approach is based on trust, in which ORI has the authority and the country concerned gives its trust. The author sees UN Women's success in overcoming discrimination against women in India. Viewed through the implementation of the theory of the Role of International Organizations in overcoming it. Where in the management approach there is monitoring through state reports, based on expert input, as well as based on IGO input. This is also supported by capacity building through cooperation programs to reduce discrimination against women. All of these approaches have been quite successful in reducing discrimination against women. In addressing gender inequality in India, the government ratified the CEDAW Convention to eliminate all forms of

discrimination against women. This ratification was carried out on July 9, 1993. The existence of UN Women in India contributes to addressing gender equality, although this issue is quite complex and deeply rooted in India.

Keywords: Roles, UN Women, Social Discrimination, India

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

India merupakan negara yang berada di wilayah Asia dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Konflik yang muncul di India disebabkan oleh sejarah permasalahan negara India. Konflik tersebut berupa diskriminasi sosial dan kekerasan terhadap perempuan (Allchin dan Kosambi, 1966). Meskipun India merupakan negara dengan pertumbuhan perekonomian yang pesat, akan tetapi negara ini memiliki tingkat diskriminasi sosial yang tinggi terhadap perempuan. Diskriminasi sosial pada perempuan di India merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia mencakup hak atas kebebasan pribadi, hak berkeluarga, hak atas pekerjaan, hak atas kesejahteraan, hak berpolitik, hak perempuan, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, hingga hak atas Pendidikan. (Hanson & Dunne, 2009). Namun, selama ini perempuan dipandang hanya untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan dapur, sedangkan laki-laki dipandang sebagai pencari nafkah dan tidak mengurus rumah tangga. Pandangan ini membentuk stigma di masyarakat terhadap perempuan sebagai makhluk lemah yang hanya mampu mengerjakan pekerjaan rumah (Abdullah, Hastira and Hassanuddin 2023).

Persepsi itu pun berkembang dan diturunkan ke anak cucu yang akhirnya membentuk pola pikir di masyarakat India bahwa laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Peran dan perilaku itulah yang

akhirnya menimbulkan diskriminasi sosial terhadap perempuan di India, seperti yang terjadi di India di mana norma dan budaya masyarakat di sana menjadi penyebab terjadinya diskriminasi sosial terhadap perempuan, contohnya seperti budaya *Dowry* atau *dahej* yang dalam bahasa hindi berarti hadiah atau mas kawin yang diberikan kepada calon pengantin laki-laki, hadiah yang diberikan berupa perhiasan, uang tunai, atau alat rumah tangga yang menjadi syarat pernikahan, namun tradisi ini sering dijadikan sebagai alat transaksi oleh keluarga yang ingin menikahkan keluarganya, sehingga banyak menyebabkan *dowry death* (Khanna 2013). Inilah yang menyebabkan perempuan semakin menjadi korban diskriminasi sosial di masyarakat India. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa mempunyai anak perempuan menjadi beban keluarga. Hal ini dikarenakan ketika perempuan itu menikah wajib membayar *Dowry* (mas kawin) kepada calon mempelai pria.

Diskriminasi sosial merupakan perlakuan secara berbeda yang terjadi terhadap laki-laki dan perempuan dengan membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, hingga kedudukan sosial. Dalam penelitian ini, ketidaksetaraan terhadap perempuan di India terjadi dalam sektor sosial. Di mana, diskriminasi sosial dalam penelitian ini berfokus pada kedudukan sosial/kasta laki-laki dan perempuan. Stigma dan budaya masyarakat India yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah dan selalu dinomorduakan dari laki-laki membuat perempuan tidak dapat mengakses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Diskriminasi sosial yang berfokus pada kedudukan sosial laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh budaya dan tradisi masyarakat telah menyebabkan perempuan terpinggirkan.

Serta melakukan tindakan yang merugikan perempuan, seperti aborsi bayi perempuan, mengganti jenis kelamin bayi perempuan dan perlakuan terhadap janda di India oleh masyarakat. Diskriminasi sosial terhadap perempuan bukan fenomena baru di India, di mana perempuan di India dijauhkan dari fasilitas dasar seperti pendidikan, di mana dari total jumlah penduduk India yang setengahnya adalah perempuan, sekitar dua pertiganya mengalami buta huruf (Shastri 2014). Hal ini disebabkan oleh stigma masyarakat yang menganggap rendah perempuan.

Permasalahan diskriminasi sosial terhadap perempuan di India disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor keluarga, ras, perkawinan, perekonomian, agama, budaya, hingga stigma masyarakat dalam menganggap perempuan. Salah satu faktor terbesar yang mendorong diskriminasi sosial terhadap perempuan adalah nilai-nilai dan budaya yang dipercaya turun temurun oleh masyarakat India. Nilai dan budaya ini merupakan gambaran perempuan dalam keluarga yang disebut dengan prinsip *pativrata*. Prinsip ini menjadi pedoman penting bagi perempuan dan istri di India dalam membangun hubungan dengan laki-laki dan suami (Resen 2021). Prinsip *pativrata* bagian dari bentuk ketaatan perempuan dan istri terhadap laki-laki dan suami, baik secara hidup hingga mati. Hal ini merupakan kewajiban *religious* (Dharma) yang tinggi. Masyarakat India percaya bahwa, pahala ini datang dalam bentuk penerimaan di kehidupan selanjutnya (Doubleday dan Adams, 2020).

Prinsip *pativrata* menyebabkan lahirnya diskriminasi perempuan di India hingga menjadi warisan budaya yang merugikan. Bahkan, dalam tradisi India yang menganut ajaran Hindu, orang tua wajib memiliki uang yang banyak untuk membeli mahar ketika akan menikahkan anak perempuannya. Ini membentuk rasa

malu pada keluarga perempuan jika tidak memberikan mahar. Selain itu, setelah menikah perempuan kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari keluarga laki-laki, hingga tindak kekerasan. Maka dari itu, perempuan dianggap sebagai beban keluarga akibat prinsip *pativrata*. Tidak sedikit perempuan yang meninggal akibat kekerasan dalam rumah tangga setelah menikah.

Pada tahun 2018 angka diskriminasi terhadap perempuan di India sebesar 7.167 dalam sektor sosial. Diskriminasi sosial ini disebabkan oleh budaya dan tradisi masyarakat seperti pemberian mahar yang tinggi dari perempuan kepada laki-laki. Pemberian mahar yang tinggi telah menyebabkan kematian terhadap perempuan di India. Perempuan dianggap sebagai beban keluarga sehingga banyak terjadinya aborsi terhadap bayi perempuan yang hingga kini menjadi suatu tradisi. Tingginya diskriminasi sosial terhadap perempuan di India memperlihatkan lemahnya kontribusi dari pemerintah India dan mendorong UN *Women* sebagai organisasi internasional untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi, pada tahun 2022 diskriminasi terhadap perempuan dalam sektor sosial sudah menurun. Hal ini dikarenakan adanya implementasi dari program UN *Women* dalam keberhasilannya mengatasi diskriminasi yang terjadi pada perempuan di India dalam sektor sosial (Sonia Dalmia 2005).

UN *Women* sebagai organisasi internasional mendukung setiap negara aIGOta PBB untuk mencapai kesetaraan gender. Selain itu, telah dibentuknya kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk mempersiapkan undang-undang, program, kebijakan, dan layanan. UN *Women* sebagai organisasi internasional yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender di dunia memiliki peran untuk

menghapuskan diskriminasi sosial terhadap perempuan. Serta, mengangkat kedudukan perempuan hingga mendapatkan perlakuan dan hak yang setara (Mustika, 2021). UN *Women* berfungsi sebagai organisasi internasional yang mendukung negara anggota dalam mewujudkan kesetaraan gender. Serta, melakukan penegasan kembali mengenai pemberlakuan dan ratifikasi CEDAW yang berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya mengatasi diskriminasi perempuan (Eléonore Veillet Chowdhury, 2016). Implementasi CEDAW dan peran UN *Women* dilakukan melalui penyelenggaraan konferensi dunia.

Di mana, konferensi pertama membahas mengenai Wanita Internasional diselenggarakan di Kota Meksiko di mana inti dari konferensi tersebut adalah persetujuan akan suatu pedoman untuk bertindak sedunia atau *World Plan of Action* tentang perempuan dan kontribusi yang dapat diberikan perempuan terhadap pembangunan dan perdamaian. Setelah itu dilanjutkan oleh proklamasi yang dilakukan oleh Majelis umum sebagai *United Nations Decade For Women*. Namun kekerasan terhadap perempuan masih terlihat di India hingga saat ini, di India perempuan tidak diberikan kebebasan dalam merangkai identitasnya sebagai seorang individu. Sehingga mendorong UN *Women* sebagai organisasi internasional untuk ikut dalam membantu pemerintah India untuk mengatasi diskriminasi perempuan. Implementasi CEDAW dijadikan sebagai implementasi dari peran UN *Women* dalam mengatasi permasalahan diskriminasi sosial yang terjadi terhadap perempuan di India.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti bagaimana pendekatan implementasi peran UN *Women* dalam mengatasi diskriminasi sosial terhadap perempuan diIndia pada tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendekatan implementasi peran UN *Women* sebagai organisasi internasional dalam mengatasi diskriminasi sosial terhadap perempuan di India pada tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di India.
3. Untuk mengetahui bagaimana diskriminasi terhadap perempuan di India mempengaruhi sektor lain dalam kehidupan dan merupakan salah satu dari tindakan pemerintah India yang tidak bisa memenuhi hak-hak perempuan.

1.4 Cakupan Penelitian

Penulis membatasi cakupan penelitian ini pada tahun 2018-2022 untuk melihat dampak dan perkembangan diskriminasi terhadap perempuan di India, terutama dalam sektor sosial. Penulis memilih memulai tahun penelitian pada 2018 dikarenakan pada tahun tersebut angka diskriminasi terhadap perempuan lebih tinggi, yaitu sebesar 7.167 dibandingkan pada tahun 2017, yaitu sebesar 6.083 (*Pew Research Center 2022*). Salah satu diskriminasi yang dialami oleh perempuan India adalah dalam sektor sosial (Sonia Dalmia 2005). Dalam sektor sosial ini masih sangat dipengaruhi oleh budaya dan

tradisi masyarakat, seperti pemberian mahar yang tinggi dari pihak perempuan ke laki-laki yang disebut dengan *dowry*. Di mana, *dowry* ini menyebabkan munculnya *dowry death*. Serta, diskriminasi lainnya adalah, adanya tradisi aborsi bayi perempuan, operasi jenis kelamin bagi perempuan, dan perlakuan terhadap janda di India (*sati*). Kemudian, penulis membatasi penelitian hingga tahun 2022 karena setiap tahun diskriminasi di India sudah menurun. Penurunan diskriminasi terhadap perempuan di India merupakan bentuk keberhasilan dari implementasi program UN *Women* untuk mengatasi diskriminasi sosial yang terjadi pada perempuan India.

1.5 Tinjauan Pustaka

Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani Kasus Dowry Death, Jurnal yang ditulis oleh Lisa Cahyanida Siswanto dalam *Journal of International Relations*, Volume 6, Nomor 4, pada Tahun 2020. Jurnal ini membahas mengenai terdapat faktor yang mempengaruhi India dalam pengimplementasian Konvensi CEDAW, yaitu sikap ketidapatuhan, ambiguitas, kapabilitas, dan dimensi temporal. Sikap tersebut tidak menetapkan hal-hal yang diizinkan dan tidak diperbolehkan bagi negara India untuk menerapkan CEDAW secara individual. Sehingga, aktivis dan pengamat hukum mendesak pemerintah India untuk membentuk peraturan undang-undang yang baru perihal pemberian sanksi pidana bagi pelaku *dowry death*. Akan tetapi mayoritas aktor negara India lalai dalam menjalankan tugas sehingga diskriminatif tidak berkurang secara signifikan (Siswanto 2020).

Selain itu India juga telah mendorong perempuan untuk ikut serta dalam sektor sosial. Hal ini bertujuan untuk mengubah budaya tradisional mengenai dowry. Selain

itu, pembahasan mengenai ketidak patuhan suatu negara dalam perjanjian internasional disebabkan oleh ambiguitas setelah diratifikasinya perjanjian internasional. Serta kapabilitas yang dimiliki oleh negara dalam menghadapi perubahan sosial. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sumber tersebut untuk melakukan analisis tidak hanya pada sektor budaya mengenai dowry, akan tetapi juga pada sektor budaya dan tradisi masyarakat lainnya. Di mana masyarakat India masih banyak mengalami diskriminasi perempuan (Siswanto 2020).

Selanjutnya, Perbandingan Implementasi *The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dalam Pemenuhan Hak Politik dan Ekonomi Perempuan di Arab Saudi dan India, Jurnal yang ditulis oleh Nurjannah Abdullah, Muhammad Fajhriyadi Hastira, Hasanuddin dalam *Journal of International Affairs* Volume 3, No 1, February pada Tahun 2023. Jurnal ini membahas mengenai implementasi CEDAW di negara India dan Arab Saudi. Implementasi CEDAW mengalami kendala, seperti perbedaan agama dan budaya, serta masyarakat dan adat. Masyarakat India berfokus pada budaya dan adat istiadat yang turun temurun. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada sektor politik dan ekonomi, khususnya dalam tenaga kerja (Abdullah, Hastira and Hassanuddin 2023).

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa, India dan Arab Saudi tidak dapat melakukan implementasi CEDAW dinegaranya. Karena adanya budaya dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan pasal-pasal CEDAW. Dalam implementasi rezim internasional, dapat dilihat bahwa India mematuhi seluruh pasal. Akan tetapi tidak mampu mengimplementasikan seluruh pasal dalam kebijakan nasionalnya. Kemudian, aktor internal dan eksternal memiliki pengaruh untuk merumuskan kebijakan negara

(Abdullah, Hastira and Hassanuddin 2023). Dalam hal ini, peneliti mencoba melakukan analisis lebih lanjut mengenai peran UN *Women* terhadap diskriminasi perempuan di India. Di mana tidak hanya melihat dari implementasi pasal, akan tetapi juga program-program yang dilaksanakan UN *Women* dan pemerintah India untuk mengurangi diskriminasi perempuan.

Ketiga, Jurnal mengenai Tantangan Budaya dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di India dan Solusinya yang ditulis oleh Agneta Kristalia Tedjo, Mohammad Daffa Ramadhan, Muhammad Daffa Dirgantara, dan Raden Arief Meivio Bahari, dalam Jurnal Hubungan Internasional Tahun XIV, No. 1, Januari - Juni 2021. Jurnal ini membahas mengenai kesetaraan gender di India masih terbilang tinggi. Sehingga permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mengurangi ketidaksetaraan dan diskriminasi perempuan (Tedjo, et al. 2021).

Tradisi budaya di India menjadi salah satu tantangan. Di India masyarakat masih terikat dengan budaya yang merugikan perempuan, seperti *dowry*. Sehingga menyulitkan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Pembahasan dalam artikel ini menawarkan solusi, yaitu perlunya peningkatan pendidikan di kalangan remaja. Hal ini bertujuan untuk membentuk pemikiran baru mengenai pentingnya kesetaraan gender melalui pendidikan. Serta menghilangkan tradisi masyarakat. Kedua cara ini dianggap menjadi solusi dalam memutus rantai budaya yang mendiskriminasi perempuan. Sehingga India dapat menciptakan kesetaraan gender bagi perempuan (Tedjo, et al. 2021). Penulis akan menganalisis bagaimana peran UN *Women* dalam mengurangi diskriminasi terhadap perempuan. Selain solusi melalui pendidikan dan perubahan cara berfikir masyarakat perempuan di India.

1.6 Kerangka Pemikiran

Peran Organisasi Internasional merupakan konsep dalam mengatasi permasalahan internasional dengan menggunakan kerja sama melalui organisasi internasional (Prianggi, 2018). Terdapat tiga pendekatan dalam implementasi Organisasi Internasional, yaitu *Enforcement Approach*, *Management Approach* dan *Normatif Approach* (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008).

Tabel 1. Tiga Pendekatan dalam mengimplementasikan Organisasi

Internasional

	<i>Enforcement approach</i>	<i>Management approach</i>	<i>Normative approach</i>
Resources	<ul style="list-style-type: none">• <i>Naming and shaming</i>, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports• <i>Sanctions</i>, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming	<ul style="list-style-type: none">• <i>Monitoring</i> on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports• <i>Capacity building and problem solving</i> through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance	<ul style="list-style-type: none">• <i>Authority and legitimacy</i>

Enforcement Approach merupakan pendekatan yang bersifat memaksa dan memperlihatkan kepatuhan dalam perjanjian internasional dengan cara memaksa. Pendekatan ini menggunakan strategi hukum untuk menekan negara yang terikat dalam perjanjian internasional, agar melaksanakan dengan baik. Di mana, negara merupakan aktor rasional yang mempertimbangkan manfaat dan biaya dari perjanjian internasional. Pendekatan ini menggunakan dua alat, yaitu pemantauan dan sanksi. Pemantauan diberikan untuk melihat transparansi antara negara dan organisasi internasional mengenai pelanggaran dalam perjanjian internasional. Pemantauan dilakukan dengan pemberian laporan rutin dari negara kepada ORI yang melakukan pengawasan. Sedangkan, sanksi dilakukan jika negara lalai dalam perjanjian

internasional. Sanksi berupa *naming and shaming* (negara di permalukan) dengan menyebarkan pelanggaran negara kepada publik yang merugikan negara (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008).

Management Approach bersifat terbuka dan menekankan pada penyelesaian masalah, interpretasi aturan, dan pengembangan kapasitas, serta transparansi. Dalam pendekatan ini ORI memainkan peran penting untuk mengembangkan kapasitas dan langkah pengambilan keputusan. Selain itu, pendekatan ini dapat dikelola, transparansi, dan bekerjasama dengan aktor lain. Cara yang dilakukan dalam pendekatan ini adalah *monitoring* oleh IGOs, Laporan Pemerintah, Pembentukan Komite Khusus untuk melakukan pengawasan terhadap negara (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008). Cara kedua adalah *capacity building and problem solving*. Dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas keamanan, hukum, dan penjagaan perbatasan negara. Serta dengan memberikan bantuan teknis dan keuangan.

Normatif Approach berlandaskan kepercayaan, di mana ORI memiliki otoritas dan negara bersangkutan memberikan kepercayaan kepada ORI untuk melakukan tugas. Ini dapat dilihat melalui control dari informasi, keahlian, dan pengalaman khusus, serta pelatihan dari ORI bagi negara bersangkutan. ORI juga dianggap rasional dan netral, serta tidak memihak (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008).

Penulis hanya menggunakan dua pendekatan *management approach dan normatif approach*. Karena dua pendekatan ini menggunakan pendekatan monitoring melalui laporan pemerintah (laporan negara India terhadap UN Women), masukan para ahli dan IGO. Selain itu adanya peningkatan kapasitas dan *problem solving* mampu menjawab permasalahan diskriminasi perempuan di India. Ratifikasi CEDAW oleh

India salah satu pendekatan *normatif approach* yang meliputi otoritas dan legitimasi. Dalam hal ini, penulisan tidak menggunakan pendekatan *enforcement approach* karena dalam pendekatan ini dan permasalahan diskriminasi perempuan di India tidak dilakukannya inspeksi oleh IGO serta tidak adanya sanksi secara ekonomi dan militer. Maka dari itu penulis tidak menggunakan pendekatan *enforcement approach*.

Management approach dan *normatif approach* menghasilkan program-program kerja sama dalam mengatasi permasalahan diskriminasi perempuan di India, baik berdasarkan laporan negara melalui ratifikasi CEDAW oleh India, maupun program kerja sama berdasarkan masukan ahli dan IGO. Selain itu adanya peningkatan kapasitas melalui berbagai program kerja sama dapat meminimalisir diskriminasi terhadap perempuan di India. Hal ini juga didukung dengan adanya otoritas legitimasi *UN Women* sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

1.7 Argumen Sementara

Argumen sementara penulis soal peran UN *Women* dalam mengatasi diskriminasi perempuan di India dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat melalui implementasi melalui laporan negara dari pernyataan India setelah dilakukannya ratifikasi CEDAW. Selain itu India melakukan kerja sama dengan UN *Women* untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga bagi petani lokal di India. Serta melalui konsultasi nasional bersama masyarakat dan peneliti. Hal ini juga didukung dengan peningkatan kapasitas melalui program-program kerja sama untuk mengurangi diskriminasi perempuan. Keseluruhan implementasi peran UN *Women* ini cukup berhasil untuk mengurangi diskriminasi terhadap perempuan salah satunya dalam sektor sosial.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data berdasarkan observasi dan dokumen/teks, artikel, buku, dan jurnal yang dipelajari dan dinarasikan. Penulis juga menggunakan studi pustaka sebagai sumber penelitian dengan data yang *valid*.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah peran UN *Women* dalam mengatasi permasalahan diskriminasi terhadap perempuan di India. Sedangkan, objeknya adalah perempuan-perempuan di India yang mengalami diskriminasi sosial.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui data sekunder yang dianggap *valid*, berupa sumber dari buku, jurnal, artikel, berita media massa, hingga dokumen lainnya yang mendukung studi pustaka dan referensi.

1.8.4 Proses Penelitian

Penulis melakukan studi pustaka dengan mencari referensi dan sumber penelitian, mengumpulkan data dari sumber *valid*, dan alat pendukung lainnya untuk menjawab rumusan masalah sebagai proses penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada Bab I penulis akan menguraikan beberapa permasalahan diskriminasi yang masih berlangsung di India. Serta, penjelasan mengenai Teori Peran dan Implementasi Organisasi Internasional yang dalam hal ini adalah peran UN Women yang bekerjasama dengan pemerintah India dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pada Bab II penulis akan membahas mengenai Sejarah Masuknya UN Women di India dan Diskriminasi Perempuan dalam Sektor Sosial. Sedangkan pada Bab III penulis akan membahas mengenai Implementasi Peran UN Women dalam Mengatasi Diskriminasi Perempuan di India melalui *Management Approach dan Normatif Approach*. Serta Bab IV penutup akan menuliskan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

Sejarah Masuknya UN Women di India dan Diskriminasi Perempuan dalam Sektor Sosial

India adalah negara populasi masyarakat terbesar kedua di dunia. Selain itu, India juga negara perekonomian besar pada 1990. India memiliki kekuatan dalam sektor militer, hingga politik global. Meskipun, India mengalami perkembangan sebagai negara demokratis yang pertumbuhan perekonomian bagus. Akan tetapi, India merupakan negara yang masuk ke dalam kategori '*the most dangerous country for women*'. Hal ini disebabkan oleh adat istiadat masyarakat India yang diskriminasi terhadap perempuan. Bahkan, masyarakat India meyakini bahwa kedudukan perempuan tidak setara/lebih tinggi dari laki-laki (Khanna 2013). Maka, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan di India dalam sektor sosial yang disebabkan oleh tradisi dan budaya masyarakat India.

Diskriminasi sosial yang terjadi terhadap perempuan di India meliputi sistem *dowry*, aborsi terhadap bayi perempuan, operasi jenis kelamin bagi bayi dan anak-anak perempuan, hingga tradisi Sati atau perlakuan terhadap janda di India. Keseluruhan diskriminasi sosial ini kerap terjadi kepada perempuan di India. Terutama, dalam kurun waktu 2018-2022, tingkat kematian akibat budaya *dowry* juga meningkat. Sehingga, diskriminasi sosial ini akan menjadi bahan untuk analisa penulis di Bab III melalui teori Implementasi Organisasi Internasional oleh Joachim. Konteks permasalahan diskriminasi sosial ini akan menjadi pembahasan penulis melalui pendekatan *normatif* dan *management*.

2.1 Sejarah Masuknya UN *Women* di India

UN *Women* yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak-anak. Organisasi ini berdiri pada Juli 2010 dan mulai beroperasi pada Januari 2011. Majelis Umum PBB mendirikan UN *Women* untuk mempercepat kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di berbagai negara (*UN Women, A Comprehensive approach to ending violence against women in rural spaces in India 2022*).

Tanggapan Sekretaris Jenderal PBB mengenai Resolusi Majelis Umum PBB 63/311 telah melatar belakangi terbentuknya UN *Women*. Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan A/64/588 “*Comprehensive Proposal for the Composite Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women*” pada Januari 2006. Laporan tersebut berisi mengenai putusan untuk membentuk identitas dalam membantu PBB untuk berkontribusi dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (UN *Women 2014*).

Direktur Eksekutif pertama UN *Women* (Wanita PBB) adalah Michelle Bachelet yang merupakan mantan Presiden Chile. Pembentukan ini adalah agenda reformasi PBB yang terdiri dari *Division for the Advancement of Women* (DAW), *International Research and Training Institute for the Advancement of Women* (INSTRAW), *Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women* (OSAGI), dan *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) (UN *Women 2014*). UN *Women* bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender, membuka kesempatan dan mengatasi diskriminasi perempuan. Ketentuan dalam

Resolusi 63/311 oleh Majelis Umum PBB pada 2 Oktober 2010 merupakan *blue print* UN *Women*. PBB berfokus pada kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan yang dipimpin oleh *Under Secretary-General* (UN *Women* 2014).

UN *Women* masuk ke India dengan tujuan untuk memberikan tanggapan mengenai diskriminasi perempuan melalui kerja sama dengan masyarakat, pemerintah, mitra lokal, dan organisasi internasional melalui program khusus. Program UN *Women* juga mempengaruhi kebijakan dalam negeri India (Shastri 2014). Maka, fungsi UN *Women* adalah untuk memberikan bantuan dan program kerja sama dalam mengatasi diskriminasi perempuan.

Beberapa masyarakat di India melalui kehidupan dengan budaya *patrilineal/patriarki* yang di dominasi oleh laki-laki. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana laki-laki sebagai kepala keluarga berperan untuk mengambil berbagai keputusan. India yang merupakan negara berkembang kerap melakukan diskriminasi terhadap perempuan dalam sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan, sosial, nilai-nilai, adat istiadat, hingga pelecahan. Diskriminasi perempuan di India ini bisa melahirkan rintangan untuk perempuan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi (Shastri 2014).

Kejahatan perempuan di India naik 43,5% pada 2018 menurut *National Crime Records Bureau*, Divisi Kementerian Dalam Negeri India (Shah 2017). Ini disebabkan oleh budaya patriarki yang meninggikan laki-laki dan mengesampingkan perempuan dalam sistem sosial masyarakat. Ini mendorong masyarakat India untuk melaksanakan tradisi budaya yang diskriminatif. Diskriminasi ini merupakan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah India. Sehingga, mendapatkan sorotan internasional.

Dominasi laki-laki terhadap perempuan di India terjadi secara psikologis hingga fisik disebabkan oleh anggapan masyarakat India bahwa, perempuan lebih lemah dan menempatkan laki-laki lebih hebat. Diskriminasi perempuan di India terjadi di lingkup keluarga hingga publik (Pertiwi, Hidayat and Rizki 2021).

Diskriminasi di India sebagai negara berkembang disebabkan oleh salah satu tradisi masyarakat, seperti tradisi *dowry*. Di mana, permintaan terhadap *dowry* memicu kekerasan hingga pembunuhan. Terlebih lagi, apabila pihak perempuan tidak mampu memenuhi permintaan *dowry* tambahan. Kekerasan yang dialami oleh perempuan setelah menikah memicu krisis untuk bunuh diri atau dibunuh oleh keluarga laki-laki. Bahkan, kasus bunuh diri dan pembunuhan tersebut kerap kali disamakan sebagai kasus bunuh diri yang dilakukan dengan sengaja oleh perempuan (Pertiwi, Hidayat and Rizki 2021).

Sebelumnya, aktivis India, Mahatma Gandhi mencetuskan gerakan kemerdekaan lewat aksi demonstrasi damai. Ini dilakukan dengan tulisan dan kampanye anti *dowry* di pernikahan masyarakat India. Kampanye Gandhi menyampaikan bahwa, masyarakat India baiknya tidak menikah karena ingin memiliki *dowry*. Hal ini dikarenakan, menurut Gandhi *dowry* merupakan hal yang salah dan menimbulkan praktik buruk di masyarakat. Namun, tradisi *dowry* di India terus berkembang mengikuti zaman dan membuat para perempuan mengalami diskriminasi secara terus menerus. Bahkan, jumlah kematian perempuan di India akibat *dowry* terus meningkat. Selain itu, tradisi ini menjadi penyebab utama tingginya angka kematian, kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan (Resen 2021).

Tradisi dowry terus meluas ke berbagai bidang, hingga membuat orang tua di India melakukan tindakan diskriminasi yang lebih jauh, seperti aborsi selektif karena menganggap anak perempuan sebagai beban keluarga, hingga pergantian jenis kelamin melalui operasi. Masyarakat India masih hidup di bawah budaya patriarki. Perempuan di India tidak bisa menjalani kehidupan seperti perempuan modern di negara lain. Karena kurangnya akses pendidikan, meskipun perekonomian meningkat. Akan tetapi, kedua hal tersebut tidak mempengaruhi kesetaraan gender menjadi lebih baik di India (Pertwi, Hidayat and Rizki 2021).

Maka, dalam hal ini ada dua macam kekerasan perempuan di India, yaitu struktural dan kultural. Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berdasarkan pada sistem hukum, ekonomi, dan tata kebiasaan masyarakat. Sedangkan kekerasan kultural adalah kekerasan yang terbentuk akibat sikap, perasaan, nilai yang dianut masyarakat. Maka, dalam menyelesaikan permasalahan diskriminasi di India bekerjasama dengan organisasi internasional, yaitu *UN Women*.

2.2 Diskriminasi Sosial Perempuan di India Tahun 2018-2022

Diskriminasi sosial yang terjadi terhadap perempuan di India pada tahun 2018 berjumlah sekitar 7.167 sedangkan pada tahun 2017 berjumlah sekitar 6.083 (*Pew Research Center* 2022). Kenaikan jumlah diskriminasi sosial terhadap perempuan di India telah mendorong pemerintah India dan *UN Women* sebagai organisasi internasional untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kenaikan jumlah diskriminasi sosial terhadap perempuan telah memperlihatkan bahwa, India adalah salah satu negara

paling berbahaya bagi perempuan. Di mana, India masuk ke dalam enam kategori negara dengan ancaman bagi wanita meliputi sektor kesehatan, agama, ekonomi, perdagangan manusia, hingga budaya dan tradisi, serta kekerasan seksual dan non-seksual (BBC 2011). Tingginya angka diskriminasi dan kesenjangan terhadap perempuan didorong oleh tradisi dan budaya masyarakat yang ‘meninggikan laki-laki dan ‘mengesampingkan’ perempuan dalam sektor sosial (Sitorus 2012). Dalam subbab ini penulis akan membahas mengenai diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan di India yang disebabkan oleh praktik dari tradisi dan budaya yang sudah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum tahun 2018, diantaranya meliputi:

2.1.1 Sistem *Dowry* (Mahar)

Dowry merupakan pemberian mahar yang dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki ketika menikah. *Dowry* biasanya dapat berupa uang, perhiasan, alat elektronik, furniture, dan hal-hal lain tergantung dari permintaan laki-laki. Biasanya, tradisi dalam pemberian *dowry* adalah melihat dari tinggi rendahnya status sosial dan pendidikan laki-laki. Semakin tinggi status sosial, maka akan semakin tinggi *dowry* yang diminta oleh pihak laki-laki. Tradisi ini tidak hanya berlangsung ketika menikah, namun terus berlanjut pasca menikah. Di mana, keluarga laki-laki kerap kali mengajukan berbagai permintaan saat awal-awal pernikahan. Dan biasanya, pihak wanita menjadi pihak yang diharuskan untuk memenuhi permintaan pihak laki-laki. Hal ini juga berkaitan dengan perlakuan baik yang akan diterima wanita. Apabila, pihak keluarga wanita memenuhi permintaan pihak laki-laki, maka wanita akan diperlakukan dengan baik (Mareta 2017).

Awalnya, tradisi *dowry* hanya berlaku bagi umat Hindu. Namun, seiring berkembangnya zaman, tradisi *dowry* telah digunakan ke semua kalangan masyarakat di India, baik Kristen dan juga muslim. Munculnya tradisi *dowry* dikarenakan masyarakat India menganggap jika anak perempuan sebagai beban karena tidak mendapatkan hak waris. Maka, *dowry* perempuan dianggap membebani keluarga secara *financial* (Sitorus 2012).

Kegagalan dalam pemenuhan permintaan tradisi *dowry* oleh pihak wanita merupakan kekerasan langsung. Kekerasan ini melibatkan suami dan keluarga suami. Di mana, kekerasan ini dapat berupa ancaman, penganiayaan fisik, mental, hingga terjadinya pembunuhan atau *dowry murder*. *Dowry murder* ini berupa penyiraman minyak tanah ke tubuh wanita yang dibakar dengan api hingga tewas. Tindakan ini juga dikenal dengan praktek *bride burning* yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Nilai masyarakat dianggap sebagai kekerasan langsung, di mana nilai-nilai ini melihat rendahnya posisi perempuan mendorong rentannya perempuan menjadi korban kekerasan (Resen 2021).

Maka, kasus *dowry murder* merupakan ancaman bagi keamanan individu perempuan. Dikarenakan perempuan secara individu mengalami kekerasan dan penindasan, ketika tidak mampu memberikan *dowry* tambahan. Bahkan, *dowry murder* merupakan ancaman yang disebut sebagai *infanticide* (pembunuhan terhadap perempuan karena gender) (Resen 2021). Selain itu, *dowry murder* menjadi penyebab utama tingginya angka bunuh diri perempuan di India. Tingkat bunuh diri dan tindakan kekerasan perempuan semakin tinggi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh tradisi dan budaya masyarakat India yang memandang wanita sebagai 'kaum rendahan'.

Selain itu, di India terdapat penolakan ketika lahirnya anak perempuan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat aborsi terhadap janin perempuan yang kerap kali dilakukan, hingga pembunuhan bayi perempuan (Resen 2021).

2.1.2 *Female Feoticide* (Tradisi Aborsi Bayi Perempuan)

Pembunuhan terhadap bayi yang dilakukan dengan sengaja dan didasarkan atas jenis kelaminnya, merupakan defisini feoticide. Di mana, tradisi female feoticide telah berlangsung sejak turun temurun dan dianggap sebagai hal yang biasa (*Gendercide* 2020). Hal ini dikarenakan, masyarakat menganggap anak perempuan sebagai beban keluarga, sehingga status perempuan di masyarakat rendah. Anggapan ini telah banyak mendorong masyarakat India untuk melakukan aborsi terhadap bayi perempuan. Bahkan, banyak perempuan yang melakukan pemeriksaan jenis kelamin. Dan apabila, calon bayinya adalah perempuan maka masyarakat India akan melakukan aborsi (Sitorus 2012).

Populasi anak perempuan juga semakin menurun setiap tahunnya di India, pada tahun 1961 terdapat 976 anak perempuan:1000 anak laki-laki, kemudian pada tahun 1991 anak perempuan menjadi 945 orang. Dan pada tahun 2001, anak perempuan menjadi 997. Angka ini memperlihatkan bagaimana menurunnya populasi perempuan di India (Sitorus 2012). Akibat dari tradisi female feoticide, India telah mengalami kelebihan 31 Juta laki-laki. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya tindak kekerasan dan perilaku diskriminatif terhadap perempuan di India. Sehingga menyebabkan tingginya kasus bunuh diri yang dilakukan perempuan di India.

2.1.3 Genitoplasty (Operasi Jenis Kelamin)

Akibat dari adanya tradisi dowry dan dampak yang ditimbulkannya, yaitu dowry murder, para orang tua di India melakukan operasi jenis kelamin kepada anak perempuan yang di bawah 14 Tahun. Hal ini juga didorong agar anak perempuan kelak tidak perlu melaksanakan tradisi *dowry* ketika akan menikah. Namun biasanya, *genitoplasty* hanya dilakukan oleh orang-orang dengan ‘golongan kaya’ di India, seperti di Delhi dan Mumbai. Di mana, menurut masyarakat Delhi dan Mumbai, *genitoplasty* ini merupakan operasi dengan tarif yang lumayan murah, yaitu 2.000 *poundsterling* atau setara dengan 28 Juta Rupiah (Resen 2021). Bahkan, Dokter bedah di Kota Indore mengakui bahwa, dalam kurun waktu setahun Ia telah mengubah ratusan jenis kelamin perempuan. Hal ini juga disebabkan oleh tidak adanya sistem dan aturan mengenai *genitoplasty* di India.

2.1.4 Tradisi Sati (Perlakuan terhadap Janda di India)

Sati atau yang biasanya disebut dengan tradisi pembakaran janda di India sudah berlangsung sejak lama. Tradisi ini dilakukan untuk menghormati Dewi Sati, serta pengabdian istri kepada suaminya. Masyarakat India mempercayai bahwa, apabila seorang suami telah meninggal, maka istri pun juga harus turut mengikuti suaminya yang sudah meninggal dengan cara membakar dirinya sendiri. Meskipun sati ini merupakan tradisi yang bersifat sukarela, namun ada beberapa masyarakat yang memaksa seseorang untuk melakukan tradisi ini. Pada tahun 2006, terdapat pemberitaan bahwa terdapat tiga kasus pembakaran diri (Sitorus 2012).

Akan tetapi, tradisi ini dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam sektor sosial, sehingga pemerintah India melakukan pelarangan terhadap tradisi sati dan mewajibkan janda di India untuk menjalankan living sati, yaitu menjalani kehidupan dengan belas kasih dari keluarga suami, tidak boleh menggunakan perhiasan, dan meninggalkan seluruh kesenangan duniawi, serta menggunakan serba putih. Kebijakan ini sedikit mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan salah satunya adalah pembakaran diri dari tradisi sati ini (Resen 2021).

Berbagai tradisi masyarakat di India telah menciptakan ketidaksetaraan gender yang menjadi permasalahan utama. Ketidaksetaraan tersebut menimbulkan berbagai tindak kekerasan, seperti penyiksaan, pemerkosaan, hingga human trafficking. Kondisi ini telah mendorong organisasi internasional, UN *Women* untuk berpartisipasi dalam permasalahan diskriminasi terhadap perempuan di India.

BAB III

Implementasi Peran UN *Women* dalam Mengatasi Diskriminasi Perempuan di India melalui *Management Approach* dan *Normatif Approach*

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women atau CEDAW merupakan sebuah konvensi internasional utama yang menjunjung tinggi hak asasi perempuan untuk bebas dari perlakuan diskriminasi. CEDAW menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan telah melanggar prinsip kesetaraan dalam menghormati perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perilaku diskriminasi terhadap perempuan telah mendorong terjadinya kasus kekerasan, terutama di dalam rumah tangga (Subhan, 2004). Konvensi ini mengharuskan negara-negara peserta melalui aparaturnya dan aktor non-negara untuk mengambil langkah tegas dalam memberantas perlakuan diskriminasi terhadap perempuan di bidang sosial, budaya, sipil, ekonomi maupun politik (IWRAW Asia Pacific, 2005). Negara-negara peserta wajib untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip CEDAW tersebut ke dalam hukum nasionalnya. India menandatangani CEDAW pada 30 Juli 1980 yang kemudian diratifikasi pada 9 Juli 1993 (CEDAW, 2012). Ratifikasi CEDAW oleh India diharapkan mampu untuk memberikan perubahan yang lebih baik terkait dengan diskriminasi sosial terhadap perempuan di India. Kewajiban-kewajiban tersebut akan ditinjau ulang dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *The Constitution of India*. India akan tetap berusaha untuk mengimplementasikan pasal 5a dan 16 ayat 1 ke dalam hukum

nasionalnya. Namun tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah internal suatu kelompok masyarakat manapun di India, kecuali diberi wewenang oleh kelompok terkait (Subhan, 2004).

Setelah melakukan ratifikasi terhadap CEDAW, India melakukan deklarasi dan implementasi CEDAW dalam hukum nasionalnya. Deklarasi tersebut terdapat dalam Pasal 16 Ayat 2 mengenai pernikahan dini. Di mana Pasal ini melarang terjadinya segala bentuk pernikahan dini pada anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. CEDAW melalui pasal ini mendorong India, sebagai negara peserta untuk menentukan usia minimum bagi warga negaranya dalam melakukan pernikahan maupun pertunangan. Setiap pernikahan wajib untuk didaftarkan secara hukum. Hal ini akan memudahkan pihak berwajib untuk menangani apabila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga.

Meskipun India melakukan ratifikasi CEDAW pada tahun 1993, akan tetapi implementasi dari ratifikasi CEDAW melalui peran UN *Women* diluncurkan pada tahun 2018-2022. Di mana, program UN *Women* yang berlangsung pada tahun tersebut telah mendorong India untuk mengurangi diskriminasi sosial terhadap perempuan di India. Adapun berbagai program yang dilaksanakan oleh UN *Women* telah bekerja sama dengan pemerintah negara India, serta aktor non-negara lainnya, seperti peneliti/para ahli, IGOs, pihak swasta, dan pihak non-pemerintah. Program UN *Women* dalam rentang waktu tersebut yang diimplementasikan untuk mengurangi diskriminasi sosial terhadap perempuan yaitu, konsultasi Nasional dengan *Chief Strategy Officer* (CSO) pada Februari 2019 di India, antara UN *Women*, dan Organisasi Internasional

lainnya, *Expert Working Group (EWG)*. Pemberian masukan oleh IGOs, *Pathways to employment and entrepreneurship*. Kemudian, program yang berlangsung pada Oktober 2020, UN Women bekerjasama dengan Vodaphone Idea Foundation and NASSCOM Foundation untuk merilis aplikasi My Ambar atau My Horizon untuk membantu perempuan penyintas kekerasan dan mendukung perempuan. Pada 2018-2021 UN Women juga meluncurkan program UN Women's second chance education (SCE) dan program pembelajaran kejuruan yang didukung oleh BHP Foundation. Setelah India meratifikasi CEDAW, negara ini terus berusaha untuk memberantas diskriminasi sosial terhadap perempuan dengan melakukan kerja sama bersama organisasi internasional, UN Women dalam mengimplementasikan program khusus agar dapat mengurangi angka kekerasan (UN Women 2022).

Bab III akan menganalisis mengenai peran UN Women dalam mengatasi diskriminasi perempuan di India pada tahun 2018-2022. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan peran UN Women dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di India melalui teori Implementasi Organisasi Internasional oleh Joachim, Reinalda, and Verbeek. Dalam teori Implementasi Organisasi Internasional terdapat tiga pendekatan, yaitu *Enforcement Approach*, *Management Approach*, dan *Normatif Approach* (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008). Akan tetapi, penulis hanya menggunakan dua dari tiga pendekatan, meliputi *Management Approach* dan *Normatif Approach*. Pendekatan *Management Approach* bersifat terbuka dan dapat dikelola, serta memiliki tiga cara dalam melihat Implementasi Organisasi Internasional (Joachim, Reinalda and

Verbeek 2008). Tiga cara pendekatan tersebut meliputi *Monitoring, Capacity Building, and Problem Solving*.

Pendekatan *Normatif Approach* berlandaskan kepercayaan. Dalam hal ini, organisasi internasional memiliki otoritas sendiri, sehingga negara memberikan kepercayaan kepada organisasi internasional untuk melakukan tugasnya. Terdapat dua sumber otoritas organisasi internasional, yaitu [1] organisasi internasional memiliki kontrol melalui informasi, keahlian, pengetahuan khusus, pelatihan, hingga pengalaman. [2] organisasi internasional dianggap rasional tidak memihak sehingga, negara-negara akan meletakkan kepercayaan kepada organisasi internasional (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008). Sehingga, penulis akan menjelaskan bagaimana implementasi peran UN *Women* dalam mengatasi diskriminasi perempuan di India menggunakan pendekatan *management approach dan normatif approach*:

3.1 Pendekatan *Management* oleh UN *Women* dalam Mengatasi Diskriminasi Perempuan di India

Salah satu pendekatan dalam *management approach* adalah *monitoring*. Pendekatan *monitoring* berfokus pada upaya aktor negara dalam melakukan pengawasan dan bekerjasama dengan aktor lain. *Monitoring* bersifat terbuka dan dapat dikelola yang dilakukan dengan pengawasan melalui IGOs, Laporan Pemerintah, dan membentuk komite khusus untuk mengatasi permasalahan tersebut (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008). Sehingga, pendekatan *monitoring* menekankan bahwa organisasi internasional dapat melakukan pengawasan dan kerjasama dengan negara terkait.

Dalam hal ini adalah, UN *Women* melakukan kerjasama dan pengawasan terhadap India dalam mengatasi diskriminasi perempuan dalam sektor sosial.

3.1.1 *Monitoring* UN *Women* berdasarkan Laporan Negara

Pendekatan *monitoring* India dilakukan dengan pengawasan oleh UN *Women* sebagai organisasi internasional melalui ratifikasi *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1993. Setelah melakukan ratifikasi CEDAW, India mengimplementasi CEDAW dalam kebijakan domestik melalui implementasi program-program UN *Women* dalam rentang waktu 2018-2022. Hal ini bertujuan untuk memenuhi peran India sebagai negara yang melaksanakan dan mematuhi perjanjian internasional. Implementasi ini juga dianggap sebagai interaksi yang dilakukan oleh India dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan terkesan tidak ada paksaan terhadap pembangunan mengenai kesadaran akan kesetaraan gender (UN *Women* 2022).

Bentuk implementasi CEDAW dalam kebijakan domestik India adalah dengan memasukkan CEDAW ke dalam konstitusi pemerintah India. Konstitusi pemerintah ini menyatakan bahwa ‘pemberian hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan, serta larangan diskriminatif kepada perempuan’. Hal ini juga dituangkan dalam Pasal 15 Konstitusi India yang menyatakan bahwa ‘hak dasar dalam konstitusi India melarang diskriminasi oleh negara terhadap warga negara hanya atas dasar kasta, agama, jenis kelamin, ras, dan tempat lahir. Di mana, hak-hak ini memberi hak individu untuk menjalani kehidupan yang bermartabat’ (United Nations 2017).

Selain ratifikasi CEDAW sebagai pendekatan *monitoring*, India juga melakukan ratifikasi terhadap sejumlah instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. India juga melarang bentuk diskriminasi yang disebabkan oleh jenis kelamin terutama diskriminasi bagi perempuan. Ratifikasi CEDAW yang diimplementasikan dalam kebijakan domestik India mendorong negara tersebut untuk memberikan laporan pertanggung jawaban. Laporan ini diberikan kepada UN *Women* sebagai proses pemantauan.

India memiliki permasalahan mengenai diskriminasi perempuan, yaitu kekerasan terhadap perempuan akibat *Dowry* yang menimbulkan *Dowry Death* (Walsh 2011). Dalam mengatasi kasus kematian ini India ikut serta meratifikasi CEDAW. Akan tetapi, dalam laporan pertanggung jawaban India terhadap UN Women dan telah menyebutkan jumlah kekerasan yang dialami oleh perempuan terutama dalam keluarga, namun CEDAW *Committee* tidak memberikan hukuman terhadap India. CEDAW *Committee* hanya memberikan teguran dan merancang program pemberdayaan terhadap perempuan. Di mana program ini akan dilakukan bersama India dan UN *Women*. Kondisi ini telah menimbulkan kebingungan terhadap India. Meskipun India telah melanggar beberapa pasal yang terdapat didalam CEDAW (UNTC 2021).

Salah satu laporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh India mengenai permasalahan diskriminasi terhadap perempuan adalah deklarasi terhadap CEDAW melalui konsultasi nasional di India bersama dengan masyarakat sipil organisasi masyarakat (CSO). Konsultasi nasional ini bertujuan untuk memprioritaskan tindakan pada sektor perekonomian di India. Konsultasi nasional dilaksanakan pada Februari

2019 oleh UN *Women* dengan nama UN *Women-SEWA: Konsultasi Nasional 2019* yang bertema tindakan untuk menuju transformative perubahan bagi perempuan dalam sektor informal di India (*Ministry of Women and Child Development 2017*).

Dalam konsultasi nasional ini, pemerintah India membuat laporan mengenai perkembangan diskriminasi sosial terhadap perempuan. Laporan ini dilaporkan kepada UN *Women* dalam konsultasi nasional yang dihadiri oleh berbagai organisasi yang bekerja untuk hak-hak perempuan, seperti SEWA, WIEGO, *National Association of Street Vendors of India* (NASVI), *National Domestic Workers Movement* (NDWM), *Construction Workers Federation of India* (CWF), *Mahila Kisan Adhikar Manch* (MAKAAM), Forum untuk hak perempuan petani dan Kongres serikat buruh seluruh India (AITUC). Serta organisasi yang bekerja di bidang Kelompok Perempuan dan Kepemilikan Tanah, *Friends of Women's World Banking*, *IT for Change*, PRADAN, *Indian Society of Labour Economics and the International Labour Organization* (ILO) (UN Women, 2020). Konsultasi nasional ini akan membantu pemerintah India dalam mengurangi diskriminasi sosial yang terjadi terhadap perempuan di India.

Laporan pertanggung jawaban yang dilakukan India kepada UN *Women* memperlihatkan, bahwa diskriminasi perempuan masih berlangsung. Hal ini selaras dengan *survey* yang dilakukan oleh *Thompson Reuters Foundation* pada tahun 2018, bahwa India sebagai negara pertama yang sangat berbahaya bagi perempuan. Diskriminasi ini tidak hanya kekerasan dari perbuatan yang dilakukan pihak lain, melainkan terdapat faktor budaya dan tradisi (Chakravarti 1993).

Tabel 2. Peningkatan kasus *Dowry Deaths* di India Tahun 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Jumlah/Orang	7.167	7.141	6.966	6.753

Bahkan selaras dengan data laporan diskriminasi sosial mengenai *Dowry Deaths* tahun 2018 - 2022. Pada tahun 2018 kasus ini paling banyak dilaporkan di mana pada tahun 2019 sampai tahun 2021 kasus ini mengalami penurunan, yaitu sebanyak (Khanna 2013). Meskipun mengalami penurunan, namun dengan total kasus kurang lebih 6.000 dalam satu tahun masih tergolong sebagai jumlah yang banyak. Sehingga India terdorong untuk melakukan ratifikasi CEDAW sebagai pengaturan mengenai kekerasan terhadap kaum perempuan dan implementasi pemenuhan hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan (Khanna 2013). Peningkatan diskriminasi dengan laporan mengenai *Dowry Deaths* pada tahun 2018-2022 dengan total jumlah kasus yang banyak setiap tahunnya mendorong UN Women untuk melakukan pengawasan India, agar angka diskriminasi tersebut menurun.

Konsultasi Nasional ini menghasilkan *Expert Working Group (EWG)* yang mengimplementasikannya di India, seperti pekerja informal, pekerja formal, bisnis perempuan, dan pertanian. UN Women mendukung peng-anggaran gender untuk mendukung penuh pemerintah nasional. Anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan perempuan di berbagai bidang. Rancangan program ini secara langsung dapat mendukung keberlanjutan kesetaraan gender. Penganggaran Responsif Gender

digunakan sebagai alat untuk memantau komitmen politik mengenai kesetaraan gender (*UN Women* 2022).

3.1.2 *Monitoring UN Women* berdasarkan Masukan Ahli

Dalam mengatasi permasalahan diskriminasi sosial terhadap perempuan di India, pemerintah India dan *UN Women* melakukan monitoring berdasarkan masukan ahli. Dalam hal ini, *UN Women* melakukan diskusi bersama masyarakat, akademisi, dan pakar kebijakan guna membahas mengenai kesetaraan gender di India. *Monitoring* berdasarkan masukan ahli dilakukan dengan melakukan pengembangan dan pelatihan bersama IGOs dan masyarakat India, khususnya perempuan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi diskriminasi sosial terhadap perempuan di India. Salah satu IGOs yang memberikan masukan terhadap perempuan di India adalah *Pathways to employment and entrepreneurship*. Di mana, program ini merupakan program *UN Women* bersama petani perempuan lokal. Program ini untuk mendongkrak pendapatan keluarga petani perempuan di pedesaan. Petani perempuan memiliki tanah namun tidak digunakan dengan baik. Sehingga, program ini mengajarkan petani perempuan di pedesaan cara bercocok tanam dengan benar. Bahkan program ini juga memungkinkan petani perempuan untuk mempelajari teknik-teknik dalam menanam. Hal ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan hasil panen.

8.252 Petani perempuan telah mempelajari cara menggunakan benih berkualitas, manajemen hama, dan pertanian organik (*UN Women* 2014). Dalam program ini, petani perempuan menyelesaikan kejuruan pekerjaan dan peningkatan terhadap tahan pangan rumah tangga. Ada 300% peningkatan pendapatan harian menggunakan teknologi dehidrasi surya oleh 60 pengusaha petani di Jalgaon dan

Rayagada, India. Program ini bisa melakukan pengawetan terhadap makanan musiman yang bisa dikonsumsi sepanjang tahun. Program ini juga menggunakan pembiayaan makro dari kelompok swadaya dan dana pribadi (UN *Women* 2014).

Monitoring lainnya yang dilakukan oleh UN *Women* salah satunya adalah KTT *#WeSeeEqual Summit* yang dilaksanakan pada tahun 2019 oleh UN *Women* bersama dengan *Protector and Gamble*. Kedua organisasi internasional ini mengadakan konferensi yang dihadiri oleh Direktur Eksekutif UN *Women* Phumzile Mlambo-Ngacuka, *Chief brand officer* P&G, pemimpin bisnis dan mitra bisnis, pemerintah negara India, proporsional media dan pemimpin masyarakat sipil. Konferensi ini dilaksanakan di Mumbai pada 18 Februari 2019 (Reuters 2018). Selain itu, konferensi ini juga mengumumkan komitmen terbaru serta inisiatif dalam kesetaraan gender diseluruh benua India Kawasan Timur Tengah dan Afrika (IMEA) di *#WeSeeEqual Summit*. Kemudian, konferensi ini dipercayai akan memberikan pengaruh untuk berbagi inspirasi dan memunculkan wawasan seputar mitos yang akan mencegah negara India dalam mempercepat kemajuan kesetaraan gender. Penyatuan suara-suara untuk berbagi perspektif terkait kesetaraan gender dan diskriminasi sosial terhadap perempuan dalam berbagai aspek termasuk pemberdayaan ekonomi perempuan, periklanan dan media serta dukungan laki-laki ditempat kerja (Reuters 2018). Ini merupakan bentuk masukan dari para ahli mengenai diskriminasi sosial untuk meminimalisir terjadinya di India.

P&G secara aktif mendukung berbagai inisiatif yang dilakukan UN *Women* dengan menghabiskan USD 100 Juta bekerjasama dengan bisnis perempuan di India, Timur Tengah dan Afrika melalui kemitraan dengan berbagai program. Program ini

dapat merangsang kesempatan yang sama bagi pengusaha perempuan dan berfokus untuk membangun lingkungan bisnis yang inklusif untuk perempuan, serta mendukung pengusaha perempuan, terutama pemasok skala kecil. P&G juga akan mendidik lebih dari 23 juta remaja perempuan mengenai pubertas dan kebersihan, dan P&G akan menggunakan suara di forum seperti *#WeSeeEqualSummit* di berbagai iklan merek seperti Ariel, *Whisper*, *Always* & *Gillette* (Reuters 2018). Hal ini bertujuan untuk menyampaikan masukan para ahli sebagai pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan diskriminasi sosial di India. Konferensi ini juga menghasilkan kepentingan, dan percakapan, serta memotivasi perubahan. Sebagai pendiri UN *Women's Unstereotype Alliance* dan P&G membantu mempersiapkan rencana aksi kolektif untuk secara proaktif mengatasi dan menghilangkan *stereotip* gender dalam periklanan secara global, khususnya tidak hanya di India (Reuters 2018).

P&G telah memimpin selama bertahun-tahun dengan penggambaran progresif perempuan dan anak perempuan dalam kampanye iklan merek perusahaan, dan yang terpenting juga menunjukkan pentingnya laki-laki dalam mempromosikan kesetaraan gender melalui kampanye penting oleh beberapa merek terkenal di dunia. P&G mendukung “Studi Pelacakan tentang sikap kesetaraan gender” UN *Women*, yang akan menyediakan data mendesak tentang sikap terhadap kesetaraan gender dan membantu menginformasikan tindakan korektif melalui kebijakan dan pendidikan (UN *Women*,2019). Keseluruhan program yang dilaksanakan oleh P&G serta UN *Women* menjadi masukan dari para ahli dalam meminimalisir terjadinya diskriminasi sosial terhadap perempuan di India.

India juga secara sukarela menyetujui Program Wanita PBB yang sedang berlangsung di India. Program ini bertujuan untuk melakukan peningkatan kesetaraan gender di India yang selaras dengan Pasal 15 dan 42 dalam Konstitusi India. Di mana, menjelaskan mengenai ketentuan khusus hak-hak perempuan dalam menjamin kesetaraan gender (Vanliers 2010). Berbagai program ini merupakan masukan ahli yang diimplementasikan untuk mengurangi diskriminasi perempuan di India. Di mana, beberapa program yang diusulkan oleh ahli menjadi program yang berhasil untuk meningkatkan kesetaraan dan mengurangi diskriminasi perempuan.

3.1.3 *Monitoring UN Women berdasarkan Masukan IGO*

Pemerintah India dan UN Women juga melakukan monitoring melalui masukan IGOs, dalam hal ini IGOs dan UN Women serta pemerintah India melaksanakan berbagai program dalam mendukung penghapusan diskriminasi sosial terhadap perempuan. Salah satunya pada program yang berlangsung pada Oktober 2020, UN Women bekerjasama dengan *Vodafone Idea Foundation* and *NASSCOM Foundation* untuk merilis aplikasi *My Ambar* atau *My Horizon* untuk membantu perempuan penyintas kekerasan dan mendukung perempuan. Program ini didanai oleh UE Program Empretec-HiEERA. Kerjasama ini dimulai dengan menandatangani perjanjian pada 11 Januari 2021 sampai 28 Januari 2022 dengan Agreement Value 128.006.00 USD. Agreement tersebut memberikan pelatihan dan membantu 75-100 pengusaha wanita untuk menguatkan keterampilan kewirausahaan dan bisnis (Reuters 2018). Keseluruhan program ini merupakan masukan IGO maupun kerja sama yang dilakukan oleh UN Women bersama organisasi internasional lainnya. Hal ini bertujuan

untuk mengurangi diskriminasi di India terhadap perempuan. Program-program IGO ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai kesetaraan gender di India.

Salah satu bentuk peningkatan kapasitas dan problem solving adalah melalui pengadaan program yang mendukung tujuan untuk mengurangi diskriminasi perempuan India, yaitu melalui program Swadhar Greh Scheme yang dilaksanakan oleh *The Ministry of Women and Child Development*. Akan tetapi program ini juga mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah masih adanya keterbatasan perempuan yang menempati shelter karena maksimal distrik diisi oleh 30 orang. Meskipun, banyak perempuan yang mendapatkan tindak kekerasan setiap harinya.

UN *Women* juga meluncurkan program UN *Women's second chance education* (SCE) dan program pembelajaran kejuruan yang didukung oleh BHP *Foundation*. Program ini bertujuan untuk membantu perempuan dari latar belakang adat, pengungsi, dan perempuan berpenghasilan rendah. Program ini juga bertujuan untuk mendorong perempuan India agar mendapatkan pelajaran dan pekerjaan dengan pendidikan formal, vokasi, dan kewirausahaan dimulai pada 2018-2021. Tahap pertama adalah uji coba di berbagai negara, salah satunya yaitu India yang meliputi: [1] Negara-negara dengan penghasilan cukup rendah dan menengah dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi seperti India [2] Negara-negara yang mengalami krisis dan pengungsi [3] Negara-negara yang memiliki pengungsi serta kemiskinan dan kekerasan yang tinggi. Hasil dari program ini sekitar 60% anak perempuan sudah menyelesaikan kelas 10 dan sekitar 25% anak perempuan sudah menyelesaikan kelas 12 (Reuters 2018).

Selain itu, program ini juga berfokus untuk menghasilkan keterampilan, pelatihan, dan bimbingan terhadap perempuan. Ini bertujuan untuk meningkatkan

lapangan kerja perempuan di India. Latihan keterampilan meliputi keperawatan, hotel, ritel, jahit, pembalut, pengemasan makanan, lilin, mengendarai becak, dan transportasi lain. Ini dibuktikan dengan investasi bagi pendidikan formal dan pelatihan dengan penempatan kerja dan biaya pendidikan. Hampir 3.000 perempuan mengikuti program dan bekerjasama dengan 67 lembaga pelatihan keterampilan dengan program bantuan pemerintah (Sonia Dalmia 2005).

Program ini juga belum bisa meluas ke pelosok desa dan pemberian dana oleh pemerintah tidak stabil dan mengalami penurunan. Di mana pada tahun 2018 pemerintah India hanya memberikan 755.43Lakh. Anggaran tersebut semakin menurun pada tahun selanjutnya, yaitu sebesar 5.7177Lakh. Selain itu banyak Shelter yang tidak bagus untuk ditempati dengan fasilitas yang tidak memadai (Ministry of Law and Justice of India 2005).

Masukan IGO dalam implementasi peran UN *Women* dalam mengatasi diskriminasi sosial terhadap perempuan di India adalah melalui program, yaitu UN *Women-SEWA* yang merupakan salah satu Konsultasi Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2019. Pada Februari 2019 UN *Women* menyelenggarakan konsultasi nasional di India dengan masyarakat sipil organisasi masyarakat (CSO), peneliti, dan organisasi internasional lainnya. Bekerja sama dengan Vodaphone Idea Foundation dan NASSCOM Foundation, UN *Women* pada Oktober 2020 meluncurkan aplikasi smartphone inovatif, *My Ambar* (My Horizon), untuk membantu perempuan penyintas kekerasan dan pendukung mereka di India. Kerjasama ini sekiranya akan mencapai kesetaraan gender yang lebih baik lagi untuk mendukung program-program yang akan di jalankan oleh sebab itu pentingnya kerjasama ini.

Kerjasama Perjanjian mitra program UN *Women* didanai oleh UE Program *Empretec*-HiEERA untuk pengusaha perempuan berdampak tinggi dan pengembang ekosistem perempuan di India. Serta UN *Women* bekerjasama dengan Pemerintah India untuk mengembangkan perangkat *e-governance* yang akan menyediakan platform pembelajaran online untuk membantu pejabat pemerintah menganalisis dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas departemen pemerintah dalam mengimplementasikan anggaran gender mereka, tidak hanya itu mengembangkan produk pengetahuan yang disesuaikan seperti manual pelatihan khusus sektor, untuk mendukung peningkatan kapasitas pejabat di sektor tersebut. membantu memperkuat mekanisme di berbagai negara bagian India untuk melakukan analisis gender, menerbitkan pernyataan anggaran gender, dan mengumpulkan data terpilah gender untuk menginformasikan pembuatan kebijakan. Selain itu terdapat kerja sama antara UN *Women* dengan IGO dan kerjasama UN *Women* dan ILO.

Tidak hanya itu kesenjangan juga terjadi pada upah perempuan di India karena memiliki pengaruh dalam mencapai keadilan sosial bagi perempuan, menutup kesenjangan upah merupakan kunci dalam kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di India. Selain itu, UN *Women* juga melakukan kerja sama dengan pemerintah dalam merilis aplikasi *e-governance* sebagai wadah untuk belajar online dan membantu pemerintah India agar bisa melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas bagi departemen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kemudian, peningkatan kapasitas juga dilakukan dengan penyediaan pelatihan khusus. Hal ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme di India dalam menerbitkan anggaran yang transparansi dari program meminimalisir diskriminasi terhadap perempuan di

India. Serta bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai pembuatan kebijakan pemerintah India (Bureau 2011). Pada tahapan *monitoring* dibutuhkan peran Organisasi Internasional sebagai gabungan dari beberapa atau seluruh bangsa, serta sebagai suatu unit fungsi yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama dalam perjanjian hubungan antar negara.

3.2 Pendekatan Normatif oleh UN *Women* dalam Mengatasi Diskriminasi Perempuan di India

Kegagalan pemerintah India dalam mengatasi diskriminasi sosial terhadap perempuan, telah mendorong UN *Women* untuk berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan diskriminasi sosial di India. Kegagalan pemerintah India mendorong UN *Women* untuk mendapatkan otoritas dan legitimasi dari pemerintah untuk menyelesaikan diskriminasi sosial terhadap perempuan. Sebagai organisasi internasional UN *Women* memiliki kekuatan normatif tersendiri dalam mendukung hak-hak kesetaraan gender bagi negara peserta. Di mana, kesetaraan gender merupakan hak bagi perempuan dengan prinsip dasar dari organisasi internasional, PBB. Salah satu tujuan dari organisasi internasional adalah untuk menegaskan kembali piagam pembukaan keyakinan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap nilai sebagai manusia dan persamaan laki-laki hingga perempuan (Mareta 2017). Piagam tersebut juga membahas mengenai persamaan hak. Hak ini meliputi hak ekonomi, hak sosial, hak politik, hingga perjanjian Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya. Selain itu India juga meratifikasi sejumlah instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) secara internasional. Serta

pemerintah India melarang adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan larangan untuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini mendorong UN *Women* memiliki otoritas dan legitimasi untuk berkontribusi terhadap diskriminasi sosial perempuan di India (UN *Women* 2022).

UN *Women* sebagai organisasi internasional tidak sama dengan negara. Hal ini dikarenakan, organisasi internasional tidak memiliki kedaulatan seperti negara. Maka, dalam hal ini UN *Women* tidak sama dengan negara India. Akan tetapi, organisasi internasional dapat menjadi aktor yang berpengaruh dalam menentukan dan menjalankan kebijakan. Bersamaan dengan otoritas dan legitimasi yang dimiliki oleh UN *Women* maka organisasi internasional tersebut dapat berperan sebagai aktor yang menentukan dan menjalankan kebijakan untuk mengatasi diskriminasi sosial terhadap perempuan di India. Struktur organisasi internasional UN *Women* memiliki kekuatan yang sah secara hukum karena organisasi internasional dapat menjadi aktor politik dalam sistem pemerintahan (Mareta 2017). Dalam pendekatan nonartif dan legitimasi organisasi internasional mempunyai kendali atas segala informasi yang berfokus pada teknis, latihan, dan pengalaman yang dapat diterapkan oleh organisasi internasional dan memberikan arahan untuk memunculkan kewajiban yang memberikan keuntungan terhadap negara anggota dalam memenuhi komitmen internasional. Melalui ratifikasi CEDAW India juga telah menyetujui secara sukarela mengenai otoritas dan legitimasi program yang diterapkan oleh UN *Women* di India. Hal ini bertujuan untuk mengurangi diskriminasi sosial dan meningkatkan kesetaraan gender di India. Hal ini sejalan dengan konstitusi India sesuai dengan pasal 15 dan pasal 42 yang membahas mengenai ketentuan khusus untuk hak perempuan dalam memastikan kesetaraan gender di India.

Setelah India meratifikasi konvensi dari UN *Women* dalam kebijakan nasional negaranya maka sudah dapat di katakan bahwa India telah menyetujui dan bersedia untuk memberikan legitimasi kepada UN *Women* dalam menerapkan kebijakan dan program pemhapusan diskriminasi sosial terhadap perempuan di India. Kondisi ini menggambarkan kekuatan otoritas dan legitimasi UN *Women* untuk mengikat negara anggota, seperti India dalam meratifikasi konvensi untuk mengatasi diskriminasi sosial terhadap perempuan di India (Mareta 2017).

3.2.1 Otoritas sebagai Pendekatan Normatif oleh UN *Women*

Dalam pendekatan normatif terdapat kategori otoritas. Di mana, organisasi internasional dalam hal ini memiliki otoritas sendiri, di mana organisasi internasional memiliki otoritas dan negara bersangkutan memberikan kepercayaan kepada organisasi internasional untuk melakukan tugas. Ini dapat dilihat melalui kontrol dari informasi, keahlian, dan pengalaman khusus, serta pelatihan dari organisasi internasional bagi negara bersangkutan. Organisasi internasional juga dianggap rasional dan netral, serta tidak memihak (Joachim, Reinalda and Verbeek 2008).

Sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UN *Women* menggunakan otoritasnya untuk melakukan koordinasi dan peningkatan melalui kebijakan dan normatif, serta program dan operasional dalam meminimalisir diskriminasi sosial yang terjadi terhadap perempuan di India. Hal ini bertujuan untuk melindungi perempuan di India dari diskriminasi. Ini juga selaras dengan salah satu *framework* UN *Women* untuk berkontribusi dalam meningkatkan kepemimpinan perempuan dan berpartisipasi untuk menjaga keamanan negara bagi perempuan (UN

Women 2014). India sebagai salah satu negara anggota maka memiliki kewajiban yang sama untuk melindungi dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam struktur negara. Hal ini juga didukung setelah adanya ratifikasi CEDAW yang dilakukan oleh India. Otoritas yang dilakukan UN *Women* adalah melalui *joint strategy* sebagai mediator negara India dalam kolaborasi dengan *Department of Political Affairs* (DPA) yang menjadikan sektor perempuan sebagai seorang mediator (Mareta 2017). UN *Women* memiliki otoritas untuk menjadikan perempuan berada pada tingkat strategis. Kemudian, sebagai fasilitator untuk merumuskan kebijakan di konferensi internasional. Mediator dan fasilitator ini akan memberikan dampak terhadap kelangsungan agenda kesetaraan perempuan (Mareta 2017). Hal ini juga akan berdampak terhadap menurunnya angka diskriminasi dalam sektor sosial terhadap perempuan di India.

Selain itu, otoritas peran UN *Women* adalah dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah India tentang kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk *input and output*. *Input* dengan mengarahkan perempuan sebagai *decision makers* dan *output* dengan langkah-langkah ke depan sebagai upaya penanganan kekerasan dan diskriminasi dan keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor di India (Mareta 2017). Dalam pendekatan ini, UN *Women* sebagai organisasi internasional memiliki otoritas untuk membentuk kebijakan terhadap suatu negara, serta mengimplementasikannya. Dalam otoritas UN *Women* sebagai organisasi internasional memiliki kendali terhadap seluruh informasi mengenai pelatihan, serta pengalaman yang bisa diterapkan dan akan memberikan dampak efektif agar dapat mewujudkan kondisi dan kewajiban yang dapat memberikan keuntungan. Salah satunya adalah bagi negara-negara yang memenuhi

komitmen internasional (Kharimah 2019). Setelah ratifikasi CEDAW, India sebagai negara anggota memiliki komitmen untuk mengurangi diskriminasi sosial terhadap perempuan di India.

Salah satu otoritas UN *Women* dalam permasalahan diskriminasi perempuan di India adalah dengan diratifikasinya CEDAW oleh pemerintah India. Ratifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender di India. Otoritas ini selaras dengan konstitusi India dalam pasal 15 dan pasal 42 mengenai ketentuan khusus bagi hak-hak perempuan dalam memastikan terwujudnya kesetaraan gender di India. Selain itu, India juga memasukkan ratifikasi ini ke dalam kebijakan nasional pemerintah. Laporan pertanggung jawaban mengenai penerapan kebijakan merupakan gambaran bahwa kekuatan otoritas yang dimiliki UN *Women* mampu mengikat negara anggota seperti India setelah meratifikasi konvensi (Kharimah 2019). Upaya ini merupakan tindakan otoritas UN *Women* sebagai organisasi internasional dalam meminimalisasi diskriminasi terhadap perempuan di India. Struktur organisasi internasional UN *Women* memiliki kekuatan yang sah secara hukum karena organisasi internasional dapat menjadi aktor politik dalam sistem pemerintahan. Dalam pendekatan normatif dan legitimasi organisasi internasional mempunyai kendali atas segala informasi yang berfokus pada teknis, latihan, dan pengalaman yang dapat diterapkan oleh organisasi internasional dan memberikan arahan untuk memunculkan kewajiban yang memberikan keuntungan terhadap negara anggota dalam memenuhi komitmen internasional.

3.2.2 Legitimasi sebagai Pendekatan Normatif oleh UN *Women*

Legitimasi atau penerimaan masyarakat dan pemerintah India terhadap upaya dan tindakan yang dilakukan oleh UN *Women* meliputi beberapa kerja sama IGO dan diimplementasikan di India. Selain itu, UN *Women* juga membangun kerja sama dengan Rackitt. Kerja sama ini ditanda tangani oleh Susan Ferguso. Susan adalah perwakilan negara dan UN *Women*, serta perusahaan Rackitt. Rackitt fokus pada bidang kesehatan dan kebersihan. Kerjasama ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, peluang kewirausahaan di sektor kesehatan, kebersihan, dan sanitasi, serta sektor sosial dan ekonomi. Kerja sama ini juga mempromosikan kesetaraan gender, keragaman, dan inklusi gender. Selain kerja sama ini, UN *Women* juga melakukan pelatihan sebagai bentuk dari legitimasi penerapan program untuk mengurangi diskriminasi perempuan. Pelatihan *UN Women's Second Chance Education and Vocational Learning* (SCE) dan Junu Club bertujuan untuk memberdayakan perempuan di desa-desa India (Mareta 2017).

Selain itu, legitimasi UN *Women* yaitu dengan memasukkan agendanya ke dalam sistem politik India, melakukan identifikasi terhadap program dalam negeri, bekerjasama dengan negara bagian, dan struktur regulasi. Kemudian, UN *Women* juga berupaya untuk memasukkan peran perempuan dalam sistem birokrasi *Panchayati Raj* India melalui inovasi IT atau *technosocial*. Hal ini bertujuan untuk mendorong gender ke dalam agenda pemerintahan lokal di bawah badan *Gram Panchayat Development* (Mareta 2017). Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh UN *Women* sebagai legitimasi dalam mengatasi diskriminasi perempuan di India.

Legitimasi dilakukan melalui ratifikasi CEDAW yang sesuai dengan prinsip dan nilainya dengan adanya pemberian hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Ini bertujuan untuk mengurangi tindakan diskriminatif sesuai dengan pasal 15 konstitusi India yang menyatakan bahwa hak dasar dalam konstitusi melarang adanya diskriminatif terhadap warga negara yang didasarkan atas agama, jenis kelamin, ras, dan tempat lahir. Hak ini memberikan individu untuk menjalani kehidupan yang bermartabat (*UN Women, Violence Against Women in Politics* 2014).

Salah satu diskriminasi perempuan di India adalah dowry yang melanggar konvensi CEDAW. Melalui pasal 2 dalam CEDAW dinyatakan bahwa dalam melindungi hak asasi perempuan, setiap negara harus membuat peraturan undang-undang. Ini bertujuan untuk menghapus tindakan diskriminasi. Selanjutnya dalam pasal 5a CEDAW ditekankan bahwa negara yang telah meratifikasi memiliki kewajiban untuk mengganti perilaku sosial dan budaya masyarakat yang diskriminatif terhadap salah satu gender. Selain itu pasal 16 CEDAW menyatakan bahwa adanya kewajiban negara anggota untuk melakukan upaya agar tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, baik dalam keluarga dan pernikahan harus dihapuskan. Kedua pernyataan ini merupakan legitimasi dalam mengatasi permasalahan diskriminasi perempuan di India (*UN Women, Annual Report for Asia and the Pacific 2020-2021 2022*). Maka, keberadaan UN Women dalam permasalahan diskriminasi perempuan di India cukup memberikan kontribusi dalam mengimplementasikan program-program untuk menguranginya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Diskriminasi perempuan merupakan kondisi tercela di mana perempuan dihadapkan dengan perlakuan yang tidak menjunjung hak asasi manusia. Dalam mengatasi permasalahan diskriminasi terhadap perempuan di India dalam aspek sosial, pemerintah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi CEDAW untuk menghapus segala bentuk diskriminasi perempuan. Ratifikasi ini dilakukan pada 9 Juli 1993. Pemerintah India berkomitmen untuk mengatasi permasalahan diskriminasi sosial yang di alami oleh perempuan di India yang didukung oleh *UN Women*. *UN Women* berfokus pada penanganan diskriminasi perempuan dengan melakukan *monitoring* melalui laporan pemerintah, IGOs, masukan ahli, hingga melakukan otoritasi dan legitimasi di India.

Dalam hal *monitoring*, *UN Women* melakukan pendekatan melalui pemantauan laporan pertanggung jawaban, kerjasama dengan organisasi HAM seperti IGO, WHO, UNHCR, UNICEF dan Uni Eropa, serta dengan pemerintah India. Selain itu, menerapkan *capacity building and problem solving* dengan dukungan teknis dan keuangan kepada perempuan yang terkena dampak dan pelatihan salah satunya oleh *UN Women's Second Chance Education and Vocational Learning (SCE)* dan *Junu Club* membentuk kelompok pemberdayaan perempuan di desa-desa. Keberadaan *UN Women* di India memberikan kontribusi untuk mengatasi diskriminasi perempuan, meskipun isu ini cukup kompleks dan mengakar kuat di India.

4.2 Saran

Penulis berfokus pada analisis peran UN *Women* untuk mengatasi diskriminasi perempuan di India pada tahun 2018-2022 dengan teori Implementasi Organisasi Internasional oleh Jutta Joachim, sehingga penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai peran UN *Women* dalam diskriminasi perempuan di India dalam cakupan tahun dan teori yang berbeda. Sehingga, keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijadikan pembaharuan oleh penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Nurjannah, Muhammad Fajhriyadi Hastira, dan Hassanuddin. 2023. *Journal of International Affairs* Volume 3, No 1, February.
- Asia-Pacific. 2022. <https://asiapacific.unWomen.org/en/digital-library/publications/2022/08/un-Women-asia-and-the-pacific-annual-report-2020-2021>.
- Asia-Pacific. 2022. <https://asiapacific.unWomen.org/en/stories/op-ed/2022/09/the-gender-pay-gap-hard-truths-and-actions-needed>.
- BBC. 2011. Poll Says Afghanistan Most Dangerous for Women. BBC.
- Bureau. 2011. National Crime Record, Crime in India Analysis. <http://ncrb.nic.in/StatPublications/CII/CII2013/Statistics2013.pdf>.
- Capling, A. (2008). Australia's Trade Policy Dilemmas. *Australian Journal Of International Affairs*, 62(2), 229–244. <https://doi.org/10.1080/10357710802060576>.
- Chakravarti. 1993. "Conceptualising Brahmanical Patriarchy in Early India: Gender, caste, class, and State." *Economic and Political Weekly* 579-585.
- Dewan, Angela. 2018. India the Most Dangerous Country to be A Woman, US Ranks 10th In Survey. CNN Health, CNN.
- Doubleday, Kalli F, Dan Paul C Adams. 2020. "Women's Risk And Well- Being At The Intersection Of Dowry, Patriarchy, And Conservation: The Gendering Of Human–Wildlife Conflict." *Environment And Planning E: Nature And Space* 3 (4).
- Gendecide. 2020. Female Infanticide in India and China. https://www.gendecide.org/case_infanticide.html.
- Headquarters. 2022. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/09/in-focus-77th-session-of-the-un-general-assembly>.
- Khanna. 2013. "CEDAW and The Impact of Sexual Violence in India." *UW Bothell Policy Journal* 31-41.
- Kharimah, Rullysef Mifta. 2019. "Peran United Nations Women Dalam Penanganan Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Republik Demokratik KoLGO Periode 2015-2017."
- Joachim, Jutta, Bob Reinalda, dan Bertjan Verbeek. 2008. *International Organization and Implementation: Enforces, Managers, Authorities*. Routledge.
- Luchsinger, Gretchen, Dan Vereinte Nationen, Ed. 2019. *A Short History Of The Commission On The Status Of Women*. New York, New York, Usa: Un Women.
- Mareta, Sabillina. 2017. "Peran Un Women Dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015," 16.
- Ministry of Women and Child Development, Ministry of Women and Child Development. 2017. *About The Ministry*.

- Ministry of Law and Justice of India, Ministry of Law and Justice of India. 2005. "THE PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT."
- Mareta, Sabillina. 2017. "Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India terkait Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2011-2015."
- NCRB. 2021. National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs India. <http://ncrb.nic.in>.
- Ng & Acker. (2018). Understanding Urban Travel Behaviour By Gender For Efficient And Equitable Transport Policies. International Transport Forum Discussion Paper. 1: 1-19.
- Pertiwi, Wiwik Sukarni, Alfian Hidayat, dan Khairur Rizki. 2021. "Implementasi CEDAW di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry." IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse Vol. 3 Ed.1 55-80.
- Ravenhill, J. (2008). Fighting Irrelevance: An Economic Community 'With Asean Characteristics.' The Pacific Review, 21(4), 469-488. <https://doi.org/10.1080/09512740802294697>.
- Resen, Putu Titah Kawitri. 2021. "Kekerasan terhadap Perempuan dan Keamanan Manusia (Studi Kasus: Dowry Murder di India)." 1-23.
- Reuters. 2018. The World's Most Dangerous Countries for Women.
- Tedjo, Agneta Kristalia, Mohammad Daffa Ramadhan, Muhammad Daffa Dirgantara, dan Raden Arief Meivio. 2021. "Tantangan Budaya dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di India dan Solusinya." Jurnal Hubungan Internasional Tahun XIV, No. 1.
- Sitorus, Rosvita Walanda. 2012. "Praktek Diskriminasi Wanita Karena Budaya di India." Gender Studies and Human Rights 1-10.
- Siswanto, Lisa Cahyanida. 2020. "Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani Kasus Dowry Death." Journal of International Relations, Volume 6, Nomor 4.
- Shah, Shreya. 2017. "In 5 Years To 2015, 44% Rise In Crimes Against Women."
- Shastri, Andrey. 2014. "Gender Inequality and Women Discrimination." IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 19, Issue 11, Ver. VII 27-30.
- Sonia Dalmia, Pareena G. Lawrence. 2005. "The Institution of Dowry in India: Why It Continues to Prevail." The Journal of Developing Areas, 38(2) 71-93.
- Shastri, Andrey. 2014. "Gender Inequality and Women Discrimination." IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 19, Issue 11, Ver. VII 27-30.
- Shah, Shreya. 2017. "In 5 Years To 2015, 44% Rise In Crimes Against Women."
- UN Women, UN Women. 2022. A Comprehensive approach to ending violence against women in rural spaces in India. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2022/06/a-comprehensive-approach-to-ending-v>.
- United Nations, United Nations. 2017. General Recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendations No. 19. United States: United Nations.

- UNTC. 2021. Chapter IV Human Rights. 11 11.
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtsdg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en.
- UN Women, UN Women. 2014. Violence Against Women in Politics.
<http://asiapasific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2014/4/violence-against-women-in-politics>.
- UN Women, UN Women. 2014. Violence Against Women in Politics.
<http://asiapasific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2014/4/violence-against-women-in-politics>.
- Vanliers. 2010. Memutus Rantai Kekerasan. Semarang: BPK Gunung Mulia.
- Walsh. 2011. A Brief History of India. New York: Facts on File: 2nd ed. A Brief History of India. 2nd ed. New York: Facts on File, Inc.. UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, 1992. CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against women. [Online] Available at: <https://www.ref>.
2022. “What We Do.” Un Women – Headquarters. Diakses 9 Maret 2023.
<https://www.unwomen.org/en/what-we-do>.
- . 2022. “Gender Responsive Budgeting | Making Budgets Meet Women’s Needs.” UN Women – Asia-Pacific. 2022.
<https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/06/making-budgets-meet-womens-needs>.
- . 2022. “In focus: 77th Session of the UN General Assembly.” UN Women – Headquarters. 2022. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/09/in-focus-77th-session-of-the-un-general-assembly>.
- . 2022. “The gender pay gap, hard truths and actions needed.” UN Women.
- . 2022. “UN WOMEN Jobs - 108486- Programme Analyst - Second Chance Education Program.”2022.
- . 2022. Annual Report for Asia and the Pacific 2020-2021.